

Kapabilitas Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi Keluarga Harapan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Helly Ocktilia

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

<mailto:hellyocktilia2@gmail.com>

Abstract

The research aims to describe the capabilities of PKH companions in the graduation process of Beneficiary Families or Keluarga Penerima Manfaat (KPM) of the Family Hope Program or Program Keluarga Harapan (PKH) by examining individual capability aspects using Mayo's approach (2000), namely: personal capabilities, transfer knowledge, experience, network, and values and attitude. The research design uses a descriptive method with a qualitative approach. The results show that the capabilities of PKH social companions in carrying out their main tasks have brought about changes in the awareness of PKH KPM to undergo graduation. Personal capabilities show a persuasive and humanistic approach from social companions that consciously and without coercion lead KPM to decide to graduate; Transfer knowledge capabilities about graduation significantly determine the awareness and behavior of KPM regarding their potential and the growth of confidence in their ability to be independent; The experience capabilities of social companions have formed pedagogical, personality, social, and professional competence of social companions; The capability to build a network of social companions is carried out through four stages of the process flow: assessment of KPM problems and needs, planning to build a network, implementation of building a network, and evaluation of activities; and values and attitude capabilities are reflected in building similarities between companions and KPM as well as respect for the values held by the community. In conclusion, PKH KPM social companions in Garut

District can carry out their duties well in the graduation process of PKH KPM through their capabilities.

Keywords:

Capabilities; Social Companion; Graduation

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kapabilitas pendamping PKH dalam proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengkaji aspek- aspek kapabilitas individu menggunakan pendekatan Mayo (2000) yaitu: *personal capabilities, transfer knowledge, experience, network*, serta *values and attitude*. Design penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas pendamping sosial PKH dalam menjalankan tugas-tugas utamanya telah membawa perubahan pada kesadaran KPM PKH untuk melakukan graduasi. *Personal capabilities* menunjukkan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis dari pendamping sosial membuat KPM dengan sadar dan tanpa paksaan mengambil keputusan untuk graduasi; Kapabilitas *transfer knowledge* tentang graduasi sangat menentukan terhadap terbentuknya kesadaran dan perilaku KPM akan potensi yang dimilikinya serta tumbuhnya kepercayaan diri akan kemampuannya untuk mandiri; kapabilitas *experience* pendamping sosial telah membentuk kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pendamping sosial; kapabilitas membangun network pendamping sosial dilaksanakan melalui empat tahap alur proses yaitu asesmen masalah dan kebutuhan KPM, perencanaan membangun network, pelaksanaan membangun network, dan evaluasi kegiatan; dan kapabilitas *values dan attitude* tergambar dengan membangun kesamaan pendamping dengan KPM serta respek terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat. Simpulannya bahwa pendamping sosial KPM PKH di Kabupaten Garut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan proses graduasi KPM PKH melalui kapabilitas yang dimilikinya.

Kata Kunci

Kapabilitas; Pendamping Sosial; Graduasi

Pendahuluan

Baru-baru ini di tahun 2023, Isu-isu terkait kapabilitas pendamping sosial dalam proses graduasi keluarga telah menyoroti beberapa kekhawatiran dan tren signifikan. (Komalasari & Nugroho, 2023; Seran et al., 2023) Isu-isu ini juga sedang ditangani di berbagai negara dengan pendekatan yang berbeda, sering kali berfokus pada standar profesional, stabilitas tenaga kerja, dan efektivitas mekanisme dukungan. Sebagaimana contohnya di Australia, terdapat Asosiasi Pekerja Sosial Australia (AASW) telah memperbarui standar praktiknya untuk memastikan bahwa pekerja sosial dilengkapi dengan baik untuk menangani kasus-kasus kompleks dan mendukung proses graduasi keluarga harapan secara efektif. Standar ini menekankan pengembangan profesional berkelanjutan dan praktik etis untuk mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi di antara pekerja sosial dan keluarga harapan, alasannya adalah sulitnya mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi tersebut. (AASW, 2023) Adapun di Inggris juga terdapat isu yang menjadi masalah utama dalam kapabilitas pendamping sosial yakni adalah tingginya tingkat kekosongan di antara pekerja sosial anak dan keluarga. Meskipun ada sedikit penurunan dalam kekosongan dari tahun 2022 hingga 2023, tingkatnya tetap sangat tinggi, dengan 18.9% posisi kosong pada September 2023. Banyak dari kekosongan ini ditutupi oleh pekerja agen, yang menimbulkan tantangan untuk kontinuitas dan konsistensi dalam mendukung keluarga. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan efektivitas intervensi pekerja sosial dalam proses graduasi keluarga. (GOV.UK, 2024) Isu-isu ini menggarisbawahi perlunya sistem dukungan yang kuat bagi pekerja sosial atau pendamping sosial, termasuk dalam hal program keluarga harapan. Mengatasi kekhawatiran ini sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas pendamping sosial dalam mendukung proses graduasi keluarga dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari program-program ini.

Pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan proses graduasi keluarga dari Program Keluarga Harapan (PKH). (Rachma et al., 2022) Kapabilitas pendamping sosial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif sangat menentukan keberlanjutan dan kesuksesan penerima manfaat dalam mencapai kemandirian ekonomi. (Rahmiyati, 2015)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. (Suleman & Resnawaty, 2017) Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial berperan sebagai fasilitator yang mendukung keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memaksimalkan manfaat yang diterima dan

meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. (Fasiha, 2023) Kapabilitas pendamping sosial sangat krusial dalam membantu KPM menjalankan kewajiban dan mempersiapkan diri untuk mencapai graduasi atau keluar dari program dengan mandiri. (Sari et al., 2023)

Studi yang dilakukan oleh Noor Muhammad Adwin Luthfian (2021) menunjukkan bahwa kapabilitas pendamping sosial dalam PKH mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan meliputi pemahaman tentang kebijakan dan prosedur PKH, serta wawasan mengenai kondisi sosial-ekonomi KPM. Keterampilan yang dibutuhkan meliputi kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan problem-solving. Sikap yang diperlukan termasuk empati, ketulusan, dan komitmen terhadap pemberdayaan KPM. Penelitian yang dilakukan oleh Armalid et al., (2020) juga menemukan bahwa pendamping sosial yang memiliki tingkat kapabilitas tinggi cenderung lebih berhasil dalam mendampingi KPM mencapai graduasi. Pendamping sosial mampu memberikan bimbingan yang efektif, memfasilitasi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta membantu KPM mengembangkan usaha ekonomi produktif. Hasil studi menunjukkan bahwa kapabilitas pendamping sosial berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan KPM dalam mencapai kemandirian.

Sebagai contoh kasus, hasil penelitian dari Mustaghfirin (2017) di kabupaten Demak menunjukkan bahwa KPM yang didampingi oleh pendamping sosial dengan kapabilitas tinggi berhasil mencapai graduasi. Pendamping sosial yang kapabel mampu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh KPM, serta memberikan solusi yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian Ompusunggu & Elisa, (2023) juga menunjukan bahwa pendamping sosial yang mendapatkan pelatihan berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah mampu meningkatkan kinerja mereka. Misalnya, pelatihan mengenai teknik fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan secara rutin meningkatkan kemampuan pendamping sosial dalam memotivasi KPM dan memonitor perkembangan keluarga harapan.

Kapabilitas pendamping sosial memainkan peran penting dalam keberhasilan proses graduasi KPM dari Program Keluarga Harapan. Pendamping sosial yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat dapat memberikan dukungan yang efektif kepada KPM, membantu penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan yang diterima dengan optimal, dan mendorong kemandirian ekonomi. Peningkatan kapabilitas pendamping sosial melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan

kesuksesan program ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendamping sosial yang kapabel dapat secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan graduasi KPM, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Di kabupaten Garut terdapat kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH yang terdiri dari ibu hamil, anak-anak usia dini 0 hingga 6 tahun (dengan maksimal 2 anak), anak-anak di tingkat SD, SLTP, dan SLTA, individu dengan disabilitas berat, tunadaksa, dan keterbelakangan mental, serta lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas. Sejak diluncurkan pada tahun 2007 di 7 provinsi, jumlah KPM PKH terus meningkat secara bertahap. Hingga tahun 2020, program PKH telah diperluas ke 44 provinsi, mencakup 524 kabupaten/kota serta 5.709 kecamatan, dengan jumlah peserta mencapai 10 juta KPM. (Yanti & Adi, 2020) Sejak awal diluncurkan pada tahun 2007, PKH terus mengalami inovasi yang mengarah pada perkembangan program dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saat ini, PKH telah memasuki generasi keempat yang dimulai pada tahun 2019. Fokus kebijakan PKH di Indonesia dalam generasi keempat telah bergeser dari memberikan bantuan yang tepat sasaran dan memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial, menjadi lebih menitikberatkan pada upaya mengakhiri kemiskinan dengan menciptakan KPM PKH yang mampu lulus (graduasi) dari program, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, tetapi karena telah berhasil mandiri yaitu mencapai peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan secara holistic dimana kondisi kesehatan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas sosial, penambahan asset dan aktivitas kewirausahaan dapat terwujud secara ekonomi (Harapan, 2020; Kristian, 2022) Hasil evaluasi tentang tingkat keberhasilan graduasi hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga dalam hal jumlah KPM PKH yang berhasil lulus dari program. Salah satu wilayah yang berhasil dalam pelaksanaan proses graduasi KPM PKH adalah Kabupaten Garut. Semua kecamatan di Kabupaten Garut, yang mencakup 42 kecamatan dengan total 421 desa dan 21 kelurahan, telah menerima program PKH dengan jumlah KPM mencapai 145.930 orang. (Amiruddin, 2020) Sejalan dengan kondisi graduasi nasional, tingkat graduasi Kabupaten Garut cukup membanggakan pada tahun 2020 terdapat 4.610 KPM PKH yang graduasi dengan rincian 3.749 orang graduasi mandiri dan 861 graduasi alamiah. Namun kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2021, dimana jumlah KPM PKH yang graduasi hanya mencapai angka 575 KPM. Jumlah tersebut turun drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2020 yang mencapai angka 3.749 orang. Menurut penjelasan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut, hal ini terjadi karena

dampak dari terjadinya pandemic Covid19, yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. (Garut, 2020)

Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada aspek-aspek kapabilitas yang dikemukakan oleh Mayo Andrew (2000) yang mengidentifikasi lima aspek kapabilitas individu, yakni: pertama, kemampuan pribadi, mencakup kemampuan bawaan seseorang seperti pemikiran, tindakan, dan emosi. Kedua, keahlian profesional dan teknis, yang melibatkan kemampuan untuk bertindak secara profesional dalam segala situasi dan bersedia berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan yang lebih muda. Ketiga, pengalaman, mengacu pada tingkat keahlian dan pengalaman yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu, serta sikap terbuka terhadap pembelajaran baru. Keempat, jaringan dan hubungan personal, termasuk memiliki koneksi yang luas dengan berbagai individu, terutama yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Kelima, nilai dan sikap yang memengaruhi tindakan, meliputi prinsip-prinsip dan sikap yang membentuk perilaku di lingkungan kerja, seperti kemampuan mengelola emosi, keramahan, keterampilan sosial, dan ketegasan. Kelima aspek kapabilitas ini yang selanjutnya dikaji dalam penelitian tentang kapabilitas pendamping sosial dalam proses graduasi keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Garut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas pendamping sosial dalam mendukung proses graduasi KPM di Kabupaten Garut, serta menilai dampaknya terhadap keberhasilan program PKH. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan meningkatkan kapabilitas pendamping sosial, program-program pemberdayaan dapat lebih berhasil dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mendalam atau deskripsi mengenai kapabilitas pendamping sosial dalam proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan penelitian. Penentuan informan

dilakukan dengan cara *purposive*, yaitu ditetapkan berdasarkan tujuan dan maksud peneliti terkait dengan keperluan penelitian. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Pendamping sosial yang telah bekerja selama 1 tahun dalam program keluarga harapan.
2. Pendamping sosial yang bertugas di berbagai kecamatan di Kabupaten Garut.
3. Pendamping sosial yang aktif dalam program keluarga harapan.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa yang termasuk dalam sumber data primer pada penelitian ini adalah 6 orang yaitu pendamping sosial PKH dari wilayah kerja Kecamatan Cilawu, Tarogong Kidul, dan Sela Awi, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut, dan Koordinator Kabupaten PKH. Sumber data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen yang berisi mengenai rincian informasi dalam proses pendamping keluarga harapan PKH yang dapat memberikan penguatan terhadap data yang sudah didapat dari sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Sarantakos (1999). Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan melakukan transkrip data dan pembuatan tema. Adapun penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan tujuan agar menemukan titik jenuh dari data yang diambil.

Hasil

Gambaran Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut

Pemerintah Kabupaten Garut sangat antusias berperan aktif dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Program PKH di wilayah Kabupaten Garut sejak awal diluncurkan pada tahun 2007. (Hariandja & Muhafidin, 2024) Hal ini dimulai dari sosialisasi, koordinasi, monitoring rutin, penyediaan infrastruktur PKH, serta penyediaan anggaran sharing daerah yang diperuntukan untuk kegiatan operasional dan peningkatan kapabilitas petugas PKH Garut yang signifikan diberikan setiap tahunnya. (Alamanda et al., 2020) Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dukungan aktif Pemerintah Kabupaten Garut terhadap pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan perluasan cakupan wilayah dan penambahan jumlah KPM dan pendamping, pada tahun 2019 sudah seluruh kecamatan di Kabupaten Garut

tersentuh oleh PKH yaitu sebanyak 42 kecamatan dengan total KPM sebanyak 35.094 KPM dan jumlah SDM PKH sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah SDM PKH Kabupaten Garut Tahun 2022

No	SDM PKH	Jumlah
1	Koordinator Kabupaten (Korkab)	5
2	Administrator Pangkalan Data (APD)	5
3	Pendamping Sosial	489
Jumlah		499

Pada Tahun 2021 PPKH Kabupaten Garut memperoleh tambahan Perintah Tugas dalam Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG di 42 Kecamatan dan Pemadanan Data semua Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan pihak bank Himbara, dan pihak lain yang bersangkutan. Sedangkan jumlah total KPM PKH di wilayah Kabupaten Garut pada tahun 2021 sudah mencapai jumlah sebanyak 145.740 jiwa. Adapun data pada tahun 2024 menunjukkan data sebanyak 19.450 KPM di kabupaten Garut.(Akbar, 2024)

Keberhasilan Kabupaten Garut dalam melaksanakan PKH khususnya dalam melaksanakan proses graduasi tidak hanya karena dukungan pemerintah daerah namun keberadaan pendamping sosial PKH sebagai garda terdepan di masyarakat juga memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan PKH. Jumlah pendamping sosial PKH dari tahun ke tahun terus meningkat. Secara keseluruhan Kabupaten Garut memiliki 489 orang pendamping sosial PKH yang tersebar di 42 kecamatan.(Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020)

Keberhasilan graduasi KPM PKH yang dicapai oleh Kabupaten Garut salah satunya adalah melalui pemberlakuan Program Labelisasi. Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 32 03/3/BS.02.01/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dijelaskan bahwa labelisasi merupakan alternatif terakhir dalam melakukan graduasi. Namun faktanya di wilayah Kabupaten Garut program labelisasi membawa keberhasilan proses graduasi pada KPM PKH. Pelaksanaan labelasi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dnas Sosial Kabupaten Garut bersama dengan SDM PKH lainnya seperti Korkab dan Pendamping Sosial.

Labelisasi dilakukan dengan cara memberikan stiker atau tulisan pada rumah KPM PKH. Labelisasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) pemasangan stiker tidak menggunakan kata “miskin”; 2) tidak mengandung unsur diskriminasi dan berpotensi mencemarkan nama baik KPM; 3) diprioritaskan kepada KPM yang masuk bidik graduasi; 4) diksi pada stiker menggunakan kata dan kalimat yang layak; dan 5) memperhatikan kearifan lokal.

Program labelisasi berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah graduasi mandiri di Kabupaten Garut. Sejalan dengan kondisi graduasi nasional, Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan proses graduasi KPM PKH. Tingkat graduasi Kabupaten Garut cukup membanggakan pada tahun 2020 terdapat 4610 KPM PKH yang graduasi dengan rincian 3.749 orang graduasi mandiri dan 861 graduasi alamiah.

Pasca graduasi PPKH Kabupaten Garut juga melakukan upaya-upaya tindak lanjut dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisi graduasi mandiri berdasarkan klasifikasi pemberdayaan ekonomi;
2. Melaksanakan pembekalan bagi pendamping PKH tentang kewirausahaan pada tahun 2021
3. Melakukan seleksi tingkat prestasi pemberdayaan
4. Melakukan pemberdayaan melalui pengembangan jejaring kerja dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Garut, seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Pasirwangi yang memproses pemberdayaan KPM dengan perusahaan *Star Energy*.

Prestasi yang dicapai oleh PPKH Kabupaten Garut dalam melaksanakan graduasi KPM PKH telah membawa Kabupaten Garut memperoleh beberapa penghargaan (*Awards*), sebagai berikut:

1. Pendamping PKH Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut mendapat penghargaan atas prestasinya melaksanakan Graduasi KPM Mandiri sebanyak 454 KPM dan mendapat peringkat ke-2 se-Provinsi Jawa Barat
2. Pemda Garut menerima penghargaan Kabupaten Kota dengan Presentase Graduasi Tertinggi dari Kemensos RI.
3. Pendamping PKH Kecamatan Peundeuy, masuk dalam Tim Penyusunan Juknis Graduasi PKH Se-Indonesia

Kapabilitas Pendamping Sosial PKH dalam Graduasi KPM PKH

Gelombang generasi keempat PKH dimulai tahun 2019, dimana targeting graduasi atau masa pengakhiran kepesertaan KPM berdaya yang menjadi outcomes arah kebijakan PKH. Graduasi KPM berdaya menjadi standar kinerja Sumber Daya Manusia pelaksana PKH. Berkaitan dengan hal tersebut Pendamping Sosial sebagai salah satu SDM pelaksana PKH memiliki tugas-tugas untuk memotivasi dan memberikan penguatan kepada KPM PKH yang telah memenuhi kriteria untuk graduasi. Dalam melakukan proses graduasi, Pendamping Sosial menjalankan alur proses graduasi KPM PKH sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis KPM PKH Tahun 2020 yang dimulai dari pemutakhiran data, bidik graduasi, sosialisasi graduasi, teknik graduasi, dan terakhir penentuan layak atau tidaknya KPM PKH untuk di graduasi.

Keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Garut dalam melakukan graduasi KPM PKH, berkaitan dengan kapabilitas SDM pelaksana PKH dalam melaksanakan tahapan-tahapan sesuai alur proses graduasi yang harus dilakukan. Pendamping Sosial sebagai bagian dari SDM Pelaksana PKH memiliki peranan yang sangat besar dalam proses graduasi di lapangan untuk itu Pendamping sosial perlu memiliki kapabilitas yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2. Karakteristik Individual Informan

No	Nama/ Initial	Pendidikan	Pekerjaan	Mulai Tahun
1	ASA	S1	Pendamping	2007
2	IM	S1	Pendamping	2014
3	SAR	S1	Pendamping	2007
4	RZ	S1	Pendamping	2018
5	AA	S1	Korkab	2018
6	RD	S1	Sekretaris PPKH	2018
7	HN	SMA	KPM	2014
8	SY	SD	KPM	2019
9	YM	SMP	KPM	2018

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

1. Kapabilitas Personal Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi KPM PKH

Kapabilitas personal menggambarkan kemampuan yang dimiliki oleh pendamping sosial yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dalam penelitian ini, kapabilitas personal berkaitan dengan penampilan, pemikiran, tindakan, dan perasaan pendamping sosial terhadap KPM PKH dalam melakukan proses graduasi.

Penampilan Pendamping Sosial

Penampilan pendamping sosial yang baik membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat. Pendamping yang tampil profesional dan rapi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari KPM, yang sangat penting dalam proses pendampingan dan pemberdayaan.

Menata penampilan merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh pendamping sosial dalam berinteraksi dan menjalin relasi dengan KPM PKH maupun dengan berbagai stakeholder lainnya. Interaksi yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama antara pendamping sosial dengan KPM PKH telah membentuk citra diri dari pendamping sosial tersebut dalam pandangan KPM maupun SDM PKH lainnya seperti Korkab PKH atau unsur birokrat PKH dari Dinas Sosial. Pendamping sosial dinilai merupakan sosok yang rendah hati, ramah, dan memiliki kedekatan dengan KPM. Pendamping sosial juga menjadi sosok teladan karena memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan KPM, selalu menyediakan waktunya ketika diperlukan oleh KPM dan SDM PKH lainnya, memiliki kemampuan untuk memahami masalah dan kebutuhan KPM, memiliki kemampuan memanfaatkan sumber-sumber untuk kepentingan KPM.

Hasil FGD dengan para pendamping sosial mengungkapkan bahwa :

“Ya kalau proses pendampingan dimulai dengan asesmen kebutuhan, di mana kami mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh penerima manfaat yang mana menggunakan pendekatan humanis. Pendekatan humanis sangat penting karena setiap individu memiliki kebutuhan dan situasi unik yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua. Dengan pendekatan humanis, kami berusaha memahami dan menghargai nilai-nilai, pengalaman, dan aspirasi dari penerima manfaat. Ini membantu kami memberikan dukungan kepada penerima manfaat. Kami juga tidak boleh bersikap sombong dan harus mendengarkan keluhan dari keluarga penerima manfaat, selain itu juga kita harus memberikan perhatian dan ramah agar penerima manfaat bisa lebih nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagai pendamping sosial mereka harus bersifat humanis dimana harus menghargai KPM, tidak boleh

bersikap sombong atau angkuh, mau mendengarkan keluhan KPM, bisa memahami masalah atau kebutuhan KPM serta menunjukkan sikap penuh perhatian dan ramah. Penampilan seperti tersebut menurut para informan akan membantu dalam menciptakan kepercayaan para KPM kepada pendamping sosial dan akan mempererat hubungan sosial antara pendamping dengan KPM.

Pengetahuan Pendamping Sosial

Dalam konteks penelitian ini pengetahuan Pendamping Sosial dimaknai sebagai data, fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh Pendamping Sosial melalui pengalaman, pembelajaran, atau instropeksi yang dilakukan selama berinteraksi dengan KPM. Pada umumnya Pendamping Sosial memiliki pengetahuan yang memadai tentang karakteristik masyarakat di desa-desa dampungannya, bahwa karakteristik masyarakat yang menjadi dampungannya merupakan masyarakat perdesaan dan masyarakat transisi.

Interaksi sosial yang cukup intens antara Pendamping sosial dengan KPM membentuk pengetahuan dan cara bertindak yang tepat dari pendamping sosial dalam dalam mensosialisasikan tentang graduasi. Pada umumnya pendamping sosial menggunakan pendekatan persuasif dalam melaksanakan tahapan alur graduasi kepada KPM. Adapun berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mengungkapkan bahwa :

“Dalam mendampingi KPM PKH, kami mengedepankan pendekatan persuasif yang bersifat halus dan tidak memaksa. Pendamping sosial menggunakan cara mengajak dan membujuk KPM dengan penuh kesabaran dan pengertian, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak tertekan dalam mengambil keputusan untuk graduasi. Pendekatan persuasif penting karena kita ingin KPM merasa bahwa mereka memiliki kendali atas keputusan mereka sendiri. Dengan cara ini, keputusan untuk graduasi diambil dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis membantu KPM merasa dihargai dan didengarkan, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk mandiri.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam mendampingi KPM PKH, pendekatan persuasif yang halus dan tidak memaksa sangat diutamakan. Pendamping sosial menggunakan metode mengajak dan membujuk dengan penuh kesabaran dan pengertian, sehingga KPM merasa nyaman dan tidak tertekan dalam mengambil keputusan untuk graduasi.

2. Kapabilitas *Knowledge* Transfer Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi KPM PKH

Kapabilitas Knowledge Transfer Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi KPM PKH mengacu pada kemampuan pendamping sosial untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka mencapai kemandirian dan kesiapan untuk graduasi dari program bantuan sosial. (Imanda et al., 2024) Adapun bentuk dari kapabilitas pendamping sosial untuk bersikap profesional dalam setiap situasi dan kondisi (*profesional and technical know-how*). Para pendamping sosial umumnya melaksanakan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun kepercayaan dua arah yaitu kepercayaan KPM kepada pendamping sosial dan kepercayaan KPM pada kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Dalam upaya membangun kepercayaan KPM, pendamping sosial berusaha untuk selalu menjaga hal-hal sebagai berikut: sejalan antara perkataan dengan perbuatan, menjaga komitmen, mendengarkan dengan empati, tidak memberi janji, menunjukkan apresiasi, membangun situasi saling berbagi dan lain lain. (Angkotasan, 2022)
- 2) Mengatasi perbedaan kultur, bahasa dan kebiasaan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat kesepakatan bersama masyarakat dalam menentukan waktu dan tempat kegiatan edukasi serta melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan. (Erlinda & Mayasiana, 2023)
- 3) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami pengetahuan baru. Beberapa strategi yang digunakan yaitu dengan menajamkan (*shaping*) cara-cara berkomunikasi (tidak emosional dan tidak terprovokasi), menggunakan kata-kata sederhana, jujur, tidak mengkritisi kelemahan dan kekurangan KPM, serta memberikan pujian dan mengapresiasi perilaku positif yang ditunjukkan oleh KPM. (Machdum, 2021)

Adapun menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa :

“Kapabilitas pendamping sosial sangat penting dalam proses ini. Mereka harus memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan sosial, teknik pendampingan, dan keterampilan interpersonal. Selain itu, kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada KPM sangat krusial untuk memastikan bahwa keluarga tersebut dapat mandiri setelah graduasi.”

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa kapabilitas pendamping sosial sangat penting dalam proses graduasi keluarga penerima manfaat (KPM) Program

Keluarga Harapan (PKH). Kapabilitas ini mencakup pengetahuan mendalam tentang kebijakan sosial, teknik pendampingan, dan keterampilan interpersonal. Pendamping sosial tidak hanya perlu memahami kebijakan dan teknik yang relevan, tetapi juga harus mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan tersebut kepada KPM. Kemampuan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa KPM dapat menjadi mandiri setelah lulus dari program PKH. Tanpa kapabilitas yang kuat dalam aspek-aspek ini, keberhasilan KPM dalam mencapai kemandirian setelah graduasi akan sangat sulit tercapai.

3. Kapabilitas Membangun *Network* Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi KPM

Kapabilitas pendamping sosial dalam membangun *network* merupakan hal yang penting, karena *network* dapat memperluas dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mandiri khususnya di kabupaten Garut. Membangun *network* menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan kepada KPM. Pemberdayaan KPM PKH perlu untuk terus didorong agar terciptanya kemandirian finansial dan meningkatnya kesejahteraan keluarga secara bertahap.

Network yang dibangun oleh pendamping sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak lain baik pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perolehan sumber daya yang dibutuhkan, meningkatkan produktivitas, serta memperoleh informasi yang bermanfaat bagi KPM yang akan graduasi. Proses membangun *network* dilaksanakan melalui empat tahap alur proses yaitu asesmen masalah dan kebutuhan KPM, perencanaan membangun *network*, pelaksanaan membangun *network*, dan evaluasi kegiatan.

Adapun dalam tahapan membangun *networking*, berdasarkan hasil wawancara oleh pendamping sosial PKH dari wilayah kerja Kecamatan Tarogong Kidul yang mengungkapkan bahwa :

“Kami melakukan beberapa tahap untuk membangun network yang efektif bagi KPM. Tahap pertama adalah peningkatan kesadaran KPM tentang pentingnya membangun network. Kami membelajarkan konsep network secara dialogis dalam aktivitas pengembangan usaha. Diskusi ini membantu kami memahami pandangan KPM dan membuat mereka lebih paham serta bersedia terlibat dalam membangun network. Langkah berikutnya adalah menyusun mekanisme untuk membangun network. Kami menentukan tujuan, mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang bisa dijadikan sumber daya, serta menentukan strategi dan langkah-langkah membangun network. Kami juga melakukan peninjauan

kerjasama dengan pendekatan personal, informal, dan formal. Tujuannya untuk menggali informasi dan menjajaki untuk membangun network. Kami berbicara dengan mereka untuk memahami kebutuhan dan kesesuaian mereka dengan KPM. Adapun yang terakhir adalah kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini membantu kami mengetahui perkembangan pelaksanaan kerjasama dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul”,

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa gambaran tentang tahap-tahap membangun network yang dilakukan oleh pendamping sosial sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kesadaran KPM dalam membangun network dengan membelajarkan tentang konsep network dalam aktivitas mengembangkan usaha. Pembelajaran dilakukan secara dialogis untuk mengetahui pandangan kelompok sasaran tentang rencana membangun network agar KPM dapat memahami dan bersedia terlibat dalam membangun network.
- 2) Menyusun mekanisme untuk membangun network seperti: menentukan tujuan membangun network; mengidentifikasi dan membuat pemetaan pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber daya dalam network; menentukan strategi dan langkah-langkah membangun network
- 3) Melakukan penjajagan kerjasama dengan pihak- pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan dan kebutuhan KPM.
- 4) Membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan permasalahan dan kebutuhan KPM. Network dilaksanakan dengan menyepakati rencana kerja dan menandatangani kesepakatan kerjasama.
- 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kerjasama serta mengetahui permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan

kegiatan yang bisa menghambat tujuan network, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut.

4. Kapabilitas *experience* Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi KPM PKH

Dalam pelaksanaan tugas pendamping sosial, berbagai pengalaman yang telah diperolehnya dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan membuatnya kapabel dalam melakukan proses graduasi KPM PKH. Para pendamping sosial memiliki masa kerja antara 5 sd 15 tahun. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut, dan Koordinator Kabupaten PKH mengungkapkan bahwa :

“Ya masa kerja yang lama ini nantinya membentuk pengalaman ya, membentuk beberapa kompetensi juga ya, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Pendamping sosial harus memiliki kemampuan untuk membelajarkan KPM tentang kemandirian dan ketidaktergantungan pada bantuan sosial melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pengalaman yang mereka miliki memungkinkan mereka dalam merancang pembelajaran, menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan, serta melakukan evaluasi dan penilaian. Ya yang kedua ada juga kompetensi kepribadian, yang berkaitan dengan etika dalam kegiatan sehari-hari. Ini mencakup cara berucap, bersikap, dan berpakaian. Pendamping sosial harus menunjukkan perilaku yang profesional dan etis. yang ketiga ada kompetensi sosial adalah kemampuan untuk melakukan interaksi sosial dengan KPM, rekan sejawat, dan stakeholder. Pendamping sosial harus mampu menunjukkan empati, berpandangan positif, bersikap jujur dan terbuka, serta berorientasi pada tujuan. Setelah itu yang terakhir atau yang ke empat ada kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam. Pendamping sosial memiliki peran penting dalam transfer pengetahuan dan penanaman nilai-nilai etika dan moral kepada KPM. Mereka harus menguasai materi secara mendalam untuk dapat membimbing KPM dengan baik.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Masa kerja yang panjang dan pengalaman yang diperoleh oleh pendamping sosial membentuk empat standar kompetensi utama yang sangat penting dalam menjalankan tugas, terdapat 4 kompetensi yang bisa dibentuk yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

5. Kapabilitas *Values And Attitude* Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi KPM

Nilai dan sikap Pendamping Sosial akan mempengaruhi tindakannya di dalam melakukan pendampingan dalam proses graduasi PKH. Sikap dan nilai (*values and attitude*) dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai pendamping sosial:

- 1) Pertimbangan mengenai manfaat dari graduasi bagi KPM. Dalam melaksanakan pendampingan pendamping sosial PKH didasari oleh pertimbangan utama tentang apa manfaat yang bisa diperoleh dari graduasi PKH. Beberapa prinsip yang digunakan oleh pendamping sosial, seperti: tidak menghakimi dan tidak melakukan pelabelan maupun penghakiman kepada KPM atau pelibatan emosi secara terkendali. Pendamping sosial harus tetap melakukan pengendalian emosi, walaupun disaat KPM menunjukkan emosi yang tidak baik atau tidak terkendali.

- 2) Membangun kesamaan dengan KPM. Para pendamping sosial berupaya memposisikan dirinya sama dengan KPM dampingannya. Dalam penampilan sehari-hari selalu berusaha untuk tidak bersikap eksklusif yang dapat membatasi, memisahkan, hingga menutup diri dari luar. sehingga sikap ini memudahkan jalan dalam membangun kerjasama dengan KPM.
- 3) Respek terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai sosial yang dianut KPM dampingan adalah hubungan sosial yang dilandasi atas dasar nilai-nilai spiritual, kebersamaan, semangat gotong royong, dan nilai-nilai kekeluargaan. Nilai-nilai inilah digunakan para pendamping sosial sebagai kekuatan sehingga bisa melewati berbagai kendala yang dihadapi.
- 4) Keyakinan akan daya yang dimiliki pendamping sosial untuk memotivasi graduasi KPM. Rasa peduli (*affection*), pengetahuan (*knowledges*), pengalaman (*experience*), jaringan kerja (*network*), yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaan sebelumnya atau yang sedang dijalani, membangun keyakinan bahwa para pendamping sosial memiliki daya yang menguatkan untuk melakukan proses graduasi bagi KPM yang memenuhi kriteria

PEMBAHASAN

Pendamping Sosial sebagai bagian dari SDM Pelaksana PKH memiliki peranan yang sangat besar dalam proses graduasi KPM PKH. Untuk itu pendamping sosial perlu memiliki kapabilitas yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mengacu pada pendapatnya Mayo (2000) terdapat 5 kriteria kapabilitas individu: *personal capabilities, transfer knowledge, experience, network, serta values and attitude.*

Kapabilitas pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memainkan peran yang krusial dalam proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Mayo (2000), kapabilitas individu dapat dikategorikan ke dalam lima kriteria utama: kapabilitas personal (*personal capabilities*), transfer pengetahuan (*transfer knowledge*), pengalaman (*experience*), jaringan (*network*), serta nilai dan sikap (*values and attitude*). Dalam konteks PKH, kriteria ini menjadi landasan penting untuk memahami efektivitas pendamping sosial dalam mendukung KPM mencapai kemandirian.

1. Kapabilitas Personal

Kapabilitas personal mengacu pada kemampuan individu untuk mengelola diri dan tanggung jawab profesionalnya. (Pratama, 2023; Zamroni, 2016) Pendamping sosial PKH harus memiliki keahlian dalam manajemen waktu, komunikasi efektif, serta kemampuan untuk memahami dan mendukung KPM

secara individu.(Wijaya, 2019) Adapun menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut, dan Koordinator Kabupaten PKH yang telah mengungkapkan bahwa jam kerja pada pendamping sosial dapat meningkatkan pemahaman individu dengan meningkatkan kompetensi-kompetensi. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendamping sosial yang memiliki kapabilitas personal yang baik cenderung lebih berhasil dalam memotivasi dan membimbing KPM .Contohnya, hasil penelitian oleh Rahmawati & Kisworo, (2017) yang menunjukkan bahwa pendamping sosial yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan empati tinggi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan KPM, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas intervensi program PKH . Sejalan dengan hal ini penelitian oleh Kusnadi (2023) juga mengungkapkan bahwa kapabilitas personal juga mencakup kemampuan pendamping untuk mengelola stress dan tetap produktif di bawah tekanan, yang seringkali merupakan tantangan dalam konteks pekerjaan sosial.

2. Transfer Pengetahuan

Transfer pengetahuan adalah kemampuan pendamping untuk menyampaikan informasi dan keterampilan kepada KPM.(S. S. A. Noor, 2022) Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan sosial, teknik pendampingan, dan pengetahuan tentang sumber daya yang tersedia. (Mustanir & Yasin, 2018) Adapun teknik pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial keluarga harapan di kabupaten garut adalah melalui pendekatan humanis, yang mana agar KPM lebih merasa dihargai dan didengar.

Menurut penelitian oleh Amalia (2022) menunjukkan bahwa pendamping sosial yang memiliki kemampuan transfer pengetahuan yang tinggi dapat lebih efektif dalam mendidik KPM tentang hak-hak mereka, cara mengakses layanan publik, dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka . Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pracelia et al, (2024) yang juga menunjukkan bahwa program pelatihan berkelanjutan untuk pendamping sosial sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date dengan pengetahuan dan teknik terbaru dalam bidang kesejahteraan sosial . Dalam konteks PKH, transfer pengetahuan juga mencakup kemampuan pendamping untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan, kesehatan, dan pendidikan kepada KPM, yang semuanya merupakan aspek penting dalam proses graduasi.

3. Pengalaman

Pengalaman pendamping sosial adalah faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap efektivitas.(Mariam & Ramli, 2023) Pengalaman yang luas

dapat berefek baik bagi pendamping untuk mengatasi berbagai situasi dan tantangan yang dihadapi oleh KPM.(Situmorang & Rahayu, 2023) Adapun sebagaimana yang sudah dibahas oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut, dan Koordinator Kabupaten PKH, bahwa pengalaman dapat membentuk 4 kompetensi yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Menurut hasil penelitian dari Nurjanah (2022) menunjukkan bahwa pendamping sosial yang memiliki pengalaman lebih lama dalam bidang ini cenderung lebih mampu memberikan solusi yang efektif dan praktis bagi masalah yang dihadapi oleh KPM. Sejalan dengan hal ini, penelitian Ridwan et al., (2016) juga mengungkapkan bahwa pengalaman juga berperan dalam kemampuan pendamping untuk mengenali tanda-tanda masalah yang tidak terlihat jelas bagi pendamping yang kurang berpengalaman.

4. Jaringan

Kemampuan untuk membangun dan memanfaatkan jaringan juga merupakan kriteria penting dalam kapabilitas pendamping sosial. (Murdani & Hadromi, 2019) Jaringan mencakup hubungan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu KPM.(Fitriani et al., 2022) Hasil penelitian dari Amaliah (2020) menunjukkan bahwa pendamping sosial yang memiliki jaringan luas cenderung lebih berhasil dalam menghubungkan KPM dengan layanan yang mereka butuhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Sejalan hal ini, hasil penelitian Ibrahim et al., (2023) juga menyoroti bahwa jaringan yang kuat dapat membantu pendamping untuk menyediakan dukungan yang lebih komprehensif kepada KPM, serta untuk mengadvokasi kebutuhan mereka di tingkat yang lebih tinggi.

5. Nilai dan Sikap

Nilai dan sikap pendamping sosial sangat mempengaruhi cara mereka bekerja dengan KPM. Pendamping sosial yang memiliki nilai inklusivitas, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat individu cenderung lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan KPM Berdasarkan hasil penelitian dari Siti Zubaidah (2019) menunjukkan bahwa nilai-nilai ini membantu pendamping sosial untuk tetap termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan pendamping sosial, meskipun seringkali menghadapi tantangan besar. Begitu juga sejalan dengan penelitian dari Nurul Fitriani Eko (2021) yang menunjukkan bahwa pendamping sosial yang mengedepankan inklusivitas dapat menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai

perbedaan. Upaya Ini dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi KPM, sehingga lebih terbuka dalam berinteraksi dan menerima bantuan.

Sikap positif dan proaktif juga penting dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh KPM. Misalnya, pendamping sosial yang bersikap optimis dan percaya pada kemampuan KPM untuk berubah dan mencapai kemandirian akan lebih berhasil dalam membimbing mereka melalui proses graduasi. Sikap empati dan kesabaran juga penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang mendukung antara pendamping dan KPM.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif Pemerintah Kabupaten Garut dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Terdapat 3 kontribusi secara teoritis yakni : pertama, model intervensi sosial, yang mana dalam penelitian ini menyajikan model bagaimana intervensi sosial dan kebijakan pemerintah daerah dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Kedua, pengembangan SDM, yang mana pada penelitian penulis ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapabilitas pendamping sosial dalam keberhasilan program. Ketiga, labelisasi, yang mana dalam penelitian penulis ini memperkenalkan labelisasi sebagai strategi efektif dalam graduasi KPM PKH, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun secara praktis juga penelitian ini dapat berkontribusi pada 3 hal yakni : pertama, **peningkatan efektivitas program**, yang mana pada penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah lainnya tentang bagaimana memaksimalkan keberhasilan PKH melalui sosialisasi, koordinasi, dan monitoring rutin. Kedua, peran pendamping sosial yang mana pada penelitian ini menyoroti pentingnya peran pendamping sosial yang kompeten dalam proses graduasi KPM, termasuk kapabilitas personal, transfer pengetahuan, dan membangun jaringan. Ketiga, **strategi graduasi** dengan adanya labelisasi dan strategi yang diterapkan di Garut dapat diadopsi oleh daerah lain untuk meningkatkan tingkat graduasi mandiri KPM PKH.

Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan riset yakni terdapat pada sistem monitoring dan evaluasi yang ada masih perlu ditingkatkan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, dan riset pada jumlah pendamping sosial terus meningkat, yang mana masih diperlukan peningkatan kapabilitas dan pelatihan berkelanjutan bagi pendamping sosial untuk memastikan efektivitas program.

Adapun rekomendasi untuk kebijakan program tersebut adalah perlunya penguatan pelaksanaan program dengan meningkatkan kapabilitas pendamping

sosial secara berkelanjutan, dan pengembangan system monitoring dan evaluasi yang mana berdampak pada keberlanjutan program PKH.

Kesimpulan

Kapabilitas pendamping sosial telah membuahkan beberapa hasil positif terhadap tingkat graduasi di beberapa kecamatan Kabupaten Garut dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi KPM PKH lainnya. Hal ini bermakna bahwa kapabilitas pendamping sosial PKH dalam menjalankan tugas-tugas utamanya telah membawa perubahan pada kehidupan lokalitas kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi peserta PKH, seperti: membangkitkan kebutuhan KPM untuk melakukan graduasi dengan tumbuhnya kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, terbinanya hubungan dalam rangka perubahan (*change relationship*) yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan KPM kepada Pendamping sosial dan terbangunnya network bagi KPM graduasi dengan perusahaan-perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility*, menciptakan keinginan perubahan di kalangan KPM dengan membuka dirinya untuk menerima inovasi, memahami keinginan perubahan menjadi tindakan yang nyata melalui perencanaan kegiatan dan pengembangan ekonomi.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat dikatakan bahwa pendamping sosial KPM PKH di Kabupaten Garut telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan proses graduasi KPM PKH. Hal ini tentunya ditunjang oleh kapabilitas yang memadai dari para pendamping sosial seperti: pengetahuan dalam melakukan pendekatan berkaitan dengan sosialisasi tentang graduasi dimana pendekatan humanis dan persuasif dinilai efektif dalam melakukan pendekatan kepada KPM, pengalaman berinteraksi dalam waktu yang cukup lama antara 5-15 tahun telah membentuk kapabilitas pendamping sosial untuk melakukan proses graduasi dan melakukan pemberdayaan kepada KPM graduasi salah satunya dengan membangun network dengan berbagai stakeholder dengan menerapkan berbagai prinsip yang mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan seperti penerimaan, pengendalian emosi, partisipasi.

Bibliography

- AASW. (2023). *Practice Standards 2023*. AASW. <https://www.aasw.asn.au/practice-standards-2023/>
- Akbar, R. T. (2024). *Di Garut Penerima Bansos Rp600 Ribu 19.450 KPM, Apakah*

- Anda Sebagai Penerima? Priangan Insider.
<https://prianganinsider.pikiran-rakyat.com/info-bansos/pr-3837957924/di-garut-penerima-bansos-rp600-ribu-19450-kpm-apakah-anda-sebagai-penerima?page=all>
- Alamanda, D. T., Hadiansyah, H., & Ramdhani, A. (2020). Rancangan Solusi Pengelolaan Sampah Dengan Konsep Focus Group Discussion (Fgd) Penta Helix Di Kabupaten Garut. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 226–240.
- Amalia, F. M. (2022). *Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amaliah, A. (2020). *Capacity Building Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Di BBPPKS Kota Makassar)= Capacity Building for Social Assistance for Family Hope Program (At BBPPKS Makassar City)*. Universitas Hasanuddin.
- Amiruddin, F. (2020). *Imbas Pandemi, Graduasi Penerima PKH di Garut Turun Drastis*. <https://www.tintaputih.net/pemerintahan/pr-2722445410/imbaspandemigraduasi-penerima-pkh-di-garut-turun-drastis>
- Angkotasari, M. A. (2022). *Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan (pkh) oleh dinas sosial di kecamatan sirimau kota ambon provinsi maluku*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Armalid, I. I., Purboningsih, E. R., Widiastuti, T. R., & Ninin, R. H. (2020). Studi Eksplorasi: Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3).
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2020). *140.877 PKH Kabupaten Garut Akan Terima Bantuan Sosial Beras*. pic garut kab. <https://pic.garutkab.go.id/site/read/140877-pkh-kabupaten-garut-akan-terima-bantuan-sosial-beras>
- Erlinda, I., & Mayasiana, N. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 5(1), 13–30.
- Fasiha, F. (2023). URGENSI PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 9(1).

- Fitriani, A. P., Pazeroma, A., & Rahayu, D. (2022). Strategi pemasaran dan literasi syariah dalam mendukung pemberdayaan umkm masyarakat. *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 102–114.
- Garut, D. K. dan I. K. (2020). *Hampir 65 Persen Penduduk Garut Menerima Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19*. https://www.garutkab.go.id/skpd_news/hampir-65-persen-penduduk-garut-menerima-bantuan-sosial-di-masa-pandemi-covid-19
- GOV.UK. (2024). *Children's social work workforce*. GOV UK. <https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/children-s-social-work-workforce>
- Harapan, P. T. G. K. P. M. (KPM) P. K. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.02.01/10/2020. In *Kementrian Sosial RI*.
- Hariandja, I. G. A., & Muhafidin, D. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 29–41.
- Ibrahim, N., Mahmud, R., & Wantu, S. M. (2023). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5360–5374.
- Imanda, R., Setiawaty, S., & Qausar, H. (2024). Pendampingan Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Model Discovery Learning Berorientasi HOTS. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(4), 205–210.
- Komalasari, D., & Nugroho, F. (2023). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3182–3204.
- Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23–37.
- Kusnadi, V. Y. (2023). *PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (PDSN) DI SENTRA WYATA GUNA BANDUNG*. PERPUSTAKAAN.
- Machdum, S. V. (2021). *PROSES PEMBERDAYAAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERTEMUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA SESI PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN SRENGSENG*

- SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JA. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2), 1.
- Mariam, S., & Ramli, A. H. (2023). Pelatihan dan pendampingan membangun praktik digital marketing unggul untuk peningkatan pemasaran UMKM di Kota Jakarta Barat. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 3(4), 379–390.
- Mayo, A. (2000). The role of employee development in the growth of intellectual capital. *Personnel Review*, 29(4), 521–533. <https://doi.org/10.1108/00483480010296311>
- Murdani, M., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi di kelurahan kandri kecamatan gunungpati kota semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152–157.
- Mustaghfirin, M. (2017). *ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KEMENTERIAN SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH ALIYAH SE KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017*. STAIN Kudus.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Transect pada Perencanaan Pembangunan Community Participation in Transect on Development Planning. *Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Volume*, 8, 137–146.
- Noor, M. A. L. (2021). *PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP MUNCULNYA PERILAKU TIDAK ETIS PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA*. Program Studi Magister Manajemen, Universitas Widyatama.
- Noor, S. S. A. (2022). Supervisi Dalam Monitoring Tugas Pendamping di Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 33–41.
- Nurjanah, M. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Studi Pada Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nurul Fitriani Eko, S. (2021). *NILAI-NILAI INKLUSIF DALAM PROGRAM PENDAMPINGAN DISABILITAS DI RUMAH INKLUSIF KEBUMEN*. IAIN Purwokerto.
- Ompusunggu, D. P., & Elisa, M. (2023). Pendampingan Peningkatan Kemampuan

- Manajemen Keuangan Di Toko Plastik Silvanoor. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 55–65.
- Pracelia, V. R., Widodo, D., & Radjikan, R. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA–JAWA TIMUR. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(3), 21–30.
- Pratama, Z. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Personal Branding Terhadap Profesionalisme Kerja Karyawan CV Kolaborasi Abadi Bukittinggi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1030–1045.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93–104.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 161–169.
- Rahmiyati, N. (2015). Model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto. *JMM17: Jurnal Ilmu ekonomi dan manajemen*, 2(02).
- Ridwan, R., Ambarita, A., & Suntoro, I. (2016). Manajemen Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Pendampingan Pendekatan Kolaboratif. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 4(1).
- Sari, N. P. D. A. P., Purnamaningsih, P. E., & Wijaya, K. A. S. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 136–149.
- Seran, R. W., Ariyani, I., & Heriani, H. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Kepuasan Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 744–769.
- Situmorang, G. E. M., & Rahayu, A. Y. S. (2023). PERAN DINAS SOSIAL MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOMPONEN KESEJAHTERAAN DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU. *Journal of Syntax Literate*, 8(9).
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88–92.

- Wijaya, S. (2019). Gerakan Literasi Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Walantaka Kota Serang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 4(2).
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2020). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 147–163.
- Zamroni, E. (2016). Urgensi career decision making skills dalam penentuan arah peminatan peserta didik. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2).
- Zubaidah, S. (2019). Pendidikan karakter terintegrasi keterampilan abad Ke-21. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika*, 3(2), 1–24.